

PEMBERANTASAN KORUPSI DI JEPANG

Amela Erliana Crhistine

Mahasiswa DIV Reguler Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

NPM 134060018014

ABSTRAK

Jepang termasuk salah satu negara yang memiliki indeks persepsi korupsi tinggi di dunia. Indeks persepsi korupsi memang bukanlah indikator yang tepat dalam menentukan bersih-tidaknya suatu negara dari korupsi, melainkan merupakan penilaian atas tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa.

Masyarakat Jepang memiliki prinsip “lebih baik mati daripada menanggung malu.” Tradisi ini menimbulkan tekanan sosial yang tinggi bagi pejabat yang melakukan kesalahan, salah satunya adalah korupsi. Begitu sebuah kasus korupsi diberitakan media, maka pihak yang terlibat akan segera mengundurkan diri dari jabatannya, terlepas dia benar bersalah atau tidak. Pemerintah Jepang juga Hal inilah yang membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya tetap terjaga sehingga indeks persepsi korupsi di Jepang tetaplah tinggi.

Kata Kunci: jepang, indeks persepsi korupsi, budaya malu

PENDAHULUAN

Jepang adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur yang terletak di ujung barat Samudra Pasifik. Terdiri dari 6.852 pulau dengan empat pulau utama yaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Sebagian besar pulau di Jepang bergunung-gunung, dan sebagian di antaranya merupakan gunung berapi.

Tentara Jepang pernah menjadi kekuatan raksasa di dunia pada masa Perang Dunia II yang berambisi untuk menguasai Asia Timur Raya, termasuk salah satunya Indonesia. Jepang sempat menguasai Indonesia selama tiga tahun sampai akhirnya peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki membuat Jepang menyerah kalah serta menarik seluruh pasukannya dari wilayah jajahan

dan membangun kembali negerinya dari kehancuran perang.

Semangat dan kekuatan yang luar biasa dari masyarakatnya berhasil membuat Jepang bangkit dan kini menjadi pemimpin di bidang ekonomi. Jepang segera berubah menjadi raksasa industri dunia dari bidang otomotif, alat berat, kimia, baja, elektronik dan industri manufaktur hingga sekarang.

Jepang menganut sistem negara monarki konstitusional. Kedudukan Kaisar Jepang diatur dalam konstitusi sebagai "simbol negara dan pemersatu rakyat" dan kepala negara dalam urusan diplomatik. Kekuasaan pemerintah berada di tangan Perdana Menteri Jepang dan anggota terpilih Parlemen Jepang, sementara kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat Jepang.

Parlemen Jepang adalah parlemen dua kamar yang terdiri dari Majelis Rendah dan Majelis Tinggi sistem ini dibentuk mengikuti sistem Inggris. Parlemen Jepang terdiri dari Majelis Rendah dan Majelis Tinggi. Anggota majelis rendah dipilih secara langsung oleh rakyat setiap 4 tahun sekali atau setelah majelis rendah dibubarkan, sementara anggota majelis tinggi dipilih setiap 6 tahun sekali.

Perdana Menteri diangkat melalui pemilihan di antara anggota Parlemen. Bila Majelis Rendah dan Majelis Tinggi masing-masing memiliki calon perdana menteri, maka calon dari Majelis Rendah

yang diutamakan. Pada praktiknya, perdana menteri berasal dari partai mayoritas di parlemen. Dalam menjalankan tugasnya, Perdana Menteri di bantu menteri-menteri cabinet yang ditunjuknya dengan persetujuan kaisar.

Perdana Menteri Jepang dapat memerintah selama partai atau koalisi partai yang berkuasa mendukungnya. Tapi selama beberapa tahun terakhir usia pemerintahan Perdana Menteri Jepang tidak terlalu lama, bahkan dalam beberapa kasus hanya memerintah selama kurang dari satu tahun.

Ketidakpastian masa jabatan ini dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya kasus korupsi di dalam pemerintahan Jepang. Masa jabatan yang tidak pasti bagi para pejabat politik menyebabkan godaan suap di pemerintahan sangat kuat, terutama yang berkaitan dengan janji kerja di masa depan.

Terlepas dari semua itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetaplah tinggi. Hal ini dikarenakan begitu sebuah kasus korupsi terungkap dan diberitakan media, pihak yang terlibat akan mengundurkan diri dari jabatannya, terlepas dia terbukti bersalah ataupun tidak. Hal inilah yang menyebabkan indeks persepsi korupsi di Jepang tetap tinggi.

PEMBAHASAN

2.1. Praktik Korupsi di Jepang

Walaupun memiliki indeks persepsi korupsi yang tinggi, bukan berarti Jepang benar-benar bersih dari korupsi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sistem birokrasi di Jepang dalam praktiknya masih memiliki banyak celah untuk terjadinya praktik korupsi. Beberapa kasus korupsi yang sempat menjadi perhatian publik di Jepang antara lain:

Skandal Tanaka dan Lockheed

Pada 1974, Kakuei Tanaka, Perdana Menteri Jepang saat itu, mengundurkan diri akibat skandal seksnya terbongkar di media Jepang. Dua tahun setelah Tanaka mengundurkan diri, seorang eksekutif Lockheed, perusahaan pesawat jet Amerika, mengaku telah menyuap sejumlah pejabat tinggi di negara calon pembeli, salah satunya adalah Tanaka, di depan Kongres AS

Media massa Jepang kembali mengkritisi kebijakan di masa Tanaka: keharusan perusahaan penerbangan Jepang menggunakan pesawat jet Lockheed. Kejaksaan segera melakukan pengusutan, 16 pejabat tinggi menjadi tersangka, termasuk Tanaka. Proses hukum, dari penyidikan sampai pengadilan, cukup lama. Baru pada 1985 Tanaka dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Ia mengajukan banding, dan sampai ia meninggal pada 1993, setelah terkena stroke di awal 1990,

belum juga ada keputusan banding dari Mahkamah Agung.

Takeshita dan Recruits

Setelah kasus Lockheed, muncul skandal insider trading saham perusahaan Recruits, menjelang akhir 1980-an. Sesungguhnya skandal ini hanya melibatkan sejumlah pejabat partai berkuasa, Partai Demokratik Liberal. Akan tetapi, Takeshita Noboru, perdana menteri dari partai tersebut mengundurkan diri pada 1989, sebagai tanda bahwa ia menarik tanggung jawab semua pejabat partainya kepada dirinya. Sebelas anggota parlemen dari partainya diusut, seorang staf Takeshita bunuh diri.

Pengusutan skandal Recruits makan waktu 13 tahun, lebih dari 320 dengar-pendapat dilakukan sebelum para tersangka diajukan ke pengadilan. Takeshita tak tersentuh, konon tetap menjadi king maker di partainya sampai meninggal pada Juni 2000.

Shinzo dan Menterinya

Skandal korupsi terheboh mungkin pada masa Perdana Menteri Abe Shinzo (2006-2007). Sejumlah pejabat di masa ini melakukan hal-hal yang mengundang kritik. Dari ulah yang tak ada hubungan dengan politik (seorang petinggi pajak memanfaatkan perumahan pemerintah untuk foya-foya; menteri kesehatan menjuluki perempuan sebagai “mesin pembuat bayi”) hingga yang serius

(menteri pertahanan mengomentari pemboman AS di Irak sebagai tak terelakkan dan sah).

Lalu Menteri Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Totshikatsu Matsuoka yang gantung diri di sebuah hotel. Waktu itu parlemen akan menginterogasi menteri Matsuoka sehubungan dengan penyalahgunaan keuangan kementerian. Sehari sesudah Matsuoka gantung diri, seorang direktur Japan Green Resources, Shinichi Yamazaki, terjun dari lantai 10 apartemen.

Japan Green diduga menyogok para politisi, termasuk Matsuoka, untuk melicinkan nasionalisasi perusahaan itu. Nasionalisasi itu sendiri merupakan akal bulus agar utang perusahaan ditanggung pemerintah.

2.2. Pemberantasan korupsi di Jepang

Jepang tidak memiliki lembaga mandiri yang bertugas menangani kasus korupsi. Proses penyelidikan hingga pemberian hukuman terhadap tersangka kasus korupsi dilaksanakan layaknya hukum pidana lainnya. Peraturan yang mengatur tentang korupsi juga tergabung dalam hukum sipil, tidak terpisah menjadi suatu aturan khusus layaknya di Indonesia.

Walaupun tidak memiliki undang-undang dan lembaga tersendiri untuk menangani kasus korupsi yang terjadi, buka berarti pemberantasan korupsi di Jepang tidak efektif. Indeks persepsi korupsi di Jepang pun tetap termasuk di jajaran atas. Selain hukuman pidana, para tersangka kasus korupsi juga

menanggung hukuman sosial dari masyarakatnya. Seperti yang telah dicontohnya di subbab sebelumnya, beban sosial yang dipikul para tersangka sangatlah besar, sehingga beberapa di antaranya justru memilih untuk bunuh diri.

Walaupun tak tertulis, hukuman sosial ini sangat berperan dalam pemberantasan korupsi di Jepang. Perasaan malu tersebut tentu membuat masyarakat Jepang, termasuk para pejabatnya, harus berpikir ribuan kali sebelum melakukan korupsi. Kalaupun masih ada yang melakukan korupsi, dia akan segera mengundurkan diri dari jabatannya sehingga rantai korupsinya dapat segera diputus.

Sayangnya Indonesia tidak mampu mencontoh hal ini. Para pejabat yang telah menjadi tersangka korupsi seolah tak punya rasa malu walupun kasus mereka telah gencar diberitakan media. Bahkan mereka sibuk melakukan pencitraan dan mencoba memutarbalikkan fakta. Bahkan beberapa tersangka kasus korupsi tetap dapat mencalonkan diri sebagai pejabat public, bahkan beberapa di antaranya ada yang terpilih.

2.2. Pencegahan korupsi di Jepang

Salah satu keunggulan lain yang dimiliki Jepang adalah sistem pendidikannya. Pendidikan di Jepang termasuk salah satu yang paling maju di dunia. Selain pendidikan akademik, sekolah-sekolah di Jepang juga sangat memperhatikan pendidikan karakter terhadap siswanya.

Di Jepang, pendidikan karakter diajarkan dalam pelajaran “seikatsuka” atau pendidikan tentang kehidupan sehari-hari. Siswa SD diajari tata tertib di masyarakat misalnya tata cara menyeberang jalan, adab di dalam kereta. Pendidikan ini pun tidak hanya terbatas teori, guru sering kali mengajak siswanya ke tempat umum dan mempraktikkannya.

Norma dalam masyarakat Jepang sangat terkait dengan ajaran Shinto dan Budha, tetapi menariknya agama ini tidak diajarkan di sekolah dalam bentuk pelajaran wajib, seperti halnya di Indonesia. Nilai-nilai agama diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Karenanya, pendidikan moral di sekolah Jepang tidak diajarkan sebagai mata pelajaran khusus, tetapi diintegrasikan dalam semua mata pelajaran. Dengan metode ini diharapkan siswa-siswi di Jepang dapat memahami nilai-nilai di masyarakat dan terbiasa untuk mematuhi tata tertib yang ada sejak dini.

Selain melalui pendidikan, pemerintah Jepang juga berusaha mencegah terjadinya korupsi melalui peningkatan transparansi pemerintah pada masyarakat. Setiap anggota parlemen Jepang wajib membuat laporan kegiatan. Laporan tahunan tersebut kemudian harus dipublikasikan melalui internet dan dapat diakses oleh publik.

Selain laporan kerja, juga diwajibkan laporan keuangan. Semua pemasukan dan pengeluaran anggota harus dipublikasikan di website. Secara rinci dimulai dengan pengeluaran 1 Yen (Rp. 100). Masyarakat bisa melihat laporan itu secara terbuka kapan saja.

KESIMPULAN

Jepang tidak memiliki undang-undang ataupun lembaga khusus yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, namun nyatanya pemberantasan korupsi di Jepang cukup efektif dijalankan. Jepang tidak mengajarkan agama sebagai mata pelajaran khusus di sekolah, tetapi Jepang sukses menanamkan nilai-nilai moral pada para siswanya. Indonesia sebagai negara yang memiliki undang-undang khusus dan KPK sebagai lembaga khusus yang menangani pemberantasan korupsi harusnya bisa lebih fokus dan efektif dalam menjalankan misinya memberantas korupsi. Indonesia yang merupakan negara beragama harusnya juga berhasil mendidik putra-putri penerus bangsa nilai-nilai agama dan moral.

Indonesia tak perlu merubah undang-undang, menghapuskan KPK, ataupun menghilangkan pelajaran agama dari sistem pendidikan agar bisa sama seperti Jepang. Cukup mengambil hal-hal yang baik untuk menyempurnakan sistem yang ada. Seperti halnya dalam transparansi pemerintahan Jepang yang patut ditiru. Dengan transparansi yang

baik, pengawasan dan kepercayaan publik juga akan meningkat sehingga pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.

3/04/fadli-zon-pengalaman-jepang-transparansi-politik-kurangi-praktik-korupsi/

(diakses pada 30 Juli 2013)

DAFTAR PUSTAKA

Castberg, Anthony Didrick. Corruption in Japan and The US.

http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No56/No56_37VE_Castberg4.pdf (diakses pada 29 Juli 2013)

Dewi, Nurfitra Kusuma. Pendidikan Karakter untuk Mengatasi Korupsi.

http://fh.upnjatim.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=172 (diakses pada 30 Juli 2013)

<http://id.wikipedia.org/wiki/Jepang> (diakses pada 30 Juli 2013)

<http://regifauzi.wordpress.com/2011/11/12/profil-negara-jepang/> (diakses pada 30 Juli 2013)

<http://sihiteezra.wordpress.com/2010/11/29/jepang-dari-korupsi-ke-korupsi/> (diakses pada 29 Juli 2013)

<http://www.antikorupsi.org/en/content/kontrol-sosial-jepang-jadi-roh-pemberantasan-korupsi> (diakses pada 29 Juli 2013)

Zon, Fadli. Pengalaman Jepang, Transparansi Politik Kurangi Praktik Korupsi.
<http://citizen.forumkeadilan.com/read/2013/0>